



**HUKUM**

**Besok, Winasa Kembali Diperiksa**

**NEGARA** - Setelah diperiksa tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali selama lima jam dalam kapasitas sebagai saksi kasus korupsi pemberian beasiswa kepada mahasiswa/i Stitna dan Stikes tahun 2009-2010, besok Winasa kembali diperiksa. Kali ini ia diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara sebagai tersangka atas kasus perjalanan dinas di Pemkab Jembrana tahun 2009-2010.

Kajari Negara, Tguh Subroto dalam keterangannya mengatakan, pemeriksaan ini merupakan lanjutan pemeriksaan pekan lalu. Usai diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pembeian beasiswa dengan tersangka Nyoman Suryadi dan Anak Agung Gede Putrayasa, Winasa diperiksa sebagai tersangka kasus perjalanan dinas. Namun baru diajukan dua pertmayaan, ia sudah mengaku tidak kuat dan sakit sehingga pemeriksaan ditunda.

"Karena Winasa sudah mengaku sakit, pemeriksaan harus ditunda. Itu sebabnya, pemeriksaan berikutnya baru dilakukan Rabu (16/4) besok. Kesepakatan ini dibuat bersama saat dilakukan penundaan dalam pemeriksaan kemarin," jelasnya.

Didampingi Kasi Pidsus Putu Sauca Arimbawa Tusan, Teguh Subroto mengatakan, pemeriksaan terhadap Winasa sempat ditunda tiga kali karena Winasa belum bisa menunjuk kuasa hukum. Karenanya piak kejaksaan terpaksa menunjuk I Nengah Nurlaba untuk mendampingi Winasa. Menurut Teguh, pemeriksaan ini merupakan kali pertama dilakukan terhadap Winasa dalam status sebagai tersangka. "Saya pastikan akan muncul tersangka baru kasus ini. Soal berapa banyak orang yang akan mendampingi Winasa sebagai tersangka, tergantung keterangan Winasa dalam pemeriksaan besok. Winasa sudah menjadi tersangka kasus yang merugikan keuangan negara Rp 600 juta lebih tersebut," sebut dia. **(don/gup)**

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 29



**POTRET**



MAULANA SANDUJAYA/RADAR BALI

### Jalan Paving Benyah

JALAN paving menuju gedung perpustakaan di Puspem Badung kondisinya rusak parah. Tampak paving-paving terlepas amburadul dan bergelombang sepanjang tiga meter. Ironisnya, jalan paving itu baru selesai dibangun awal tahun ini. Kabag Umum Setda Badung Nyoman Suardana saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu. (san/yes)

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 21



# Kejati Periksa Kadishub

Terkait Kasus Reklame Denpasar

**DENPASAR** - Kasus dugaan korupsi reklame di Pemkot Denpasar kembali dialami oleh Kejati Bali. Setelah memeriksa lima kepala SKPD terkait, kali ini giliran Kadis Perhubungan Kota Denpasar Gede Astika yang diperiksa secara mendalam.

Informasi yang dirangkum koran, Astika dipanggil lantaran posisinya terkait urusan reklame. Dia juga merupakan pejabat

► *Baca Kejati... Hal 31*



ISTIMEWA

Gede Astika

## Mereka yang Sudah Diperiksa

1. Kepala Badan Perizinan Rai Soeriawan
2. Kadispenda Dewa Nyoman Semadi
3. Kadis DTRP Kusuma Diputra.
4. Kepala DKP Ketut Wisada
5. Kasatpol PP IB Alit Widarana
6. Kadishub Gede Astika

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 21



# Kajari Denpasar

## Bentuk 5 Tim

### ■ KEJATI...

Sambungan dari hal 21

yang membidangi bersama beberapa pejabat lainnya. "Kadis Perhubungan diperiksa," ujar sumber koran ini.

Dia mengatakan Astika diperiksa oleh jaksa Wayan Subawa, yang memang menjadi ketua tim dalam penanganan kasus ini.

Usai diperiksa, Astika mengakui memang ditanya terkait dengan dugaan kasus reklame. "Saya datang memenuhi panggilan, diperiksa oleh Pak Wayan Subawa," ungkapinya.

Dia juga mengatakan hanya menjelaskan sebatas yang diketahui dalam kasus ini, yaitu reklame. "Saya kebetulan tergabung dalam tim reklame, sebatas menjelaskan sesuai yang saya tahu dan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi, Red) saya," jelasnya.

Astika mengakui bila dirinya sudah membeberkan beberapa data ke pihak kejati perihal Dishub sebagai anggota tim yang terlibat juga soal reklame di Kota Denpasar. Bahkan, lanjut

dia, Dishub memberikan masukan ke kejati supaya masalah reklame tidak mengganggu fasilitas lalu lintas seperti rambu, TL, dan fasilitas umum lainnya. "Kami hanya diminta keterangan oleh kejati, Dishub sebagai tim yang mengurus juga soal reklame. Saya tidak ditanya masalah yang spesifik," katanya.

Seperti halnya berita sebelumnya, Kejati Bali sudah memeriksa Kepala Badan Perizinan Rai Soeriawan, Kadispenda Dewa Nyoman Semadi dan Kadis DTRP Kusuma Diputra. Kemudian juga memeriksa Kadis DKP Ketut Wisada dan Kasatpol PP IB Alit Widarana. Ada dugaan ada permainan atau mafia izin reklame atau permainan pajak reklame di Denpasar. Lantaran muncul rumor ada permainan dana pelicin dalam izin reklame.

Terlepas dari kasus reklame, seperti halnya Pemkot dan Badung akan repot dengan kinerja Kajari Denpasar yang baru yaitu Immanuel Zebua. Lantaran dalam penegakan kasus korupsi, Zebua akan

serius. Setelah menggeledah Pemkot Denpasar dan Badung, kemarin dia menyampaikan bahwa sudah membentuk tim khusus penanganan kasus korupsi. "Sudah kami bentuk tim, nantinya tim ini secara khusus akan menangani kasus korupsi," jelas Zebua kemarin.

Dia mengatakan ada lima tim yang dibentuk. Bahkan, tidak memandang bagian, karena dari semua unsur jaksa terlibat. Mulai Jaksa Pidana Khusus (Pidsus), Jaksa Pidana Umum (Pidum), Jaksa Intel, dan lainnya. "Semua unsur ada, tidak harus Pidsus saja. Jaksa mesti tetap paham atas semua kasus, tidak harus pada bidang masing-masing. Kasi Pidum saja ikut memimpin tim," ungkap Zebua.

Lima tim ini nantinya akan mendalami kasus-kasus dugaan korupsi di Denpasar dan Badung. Untuk di Denpasar masih pendalaman materi setelah turun mengambil data. Sedangkan Badung muncul lagi kasus dugaan korupsi, selain kasus *tirta yatra* ke Gunung Salak di Inspektorat,

ternyata muncul kasus dugaan korupsi ke India. "Kami akan dalam, semoga nanti mendapatkan celah dan mampu menuntaskan kasus ini. *Masak* lima tim tidak bisa tuntas," jelasnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, terkait dengan permainan perjalanan dinas Pemkot Denpasar didapatkan data, bahwa realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 432.473.819.954 (Rp 432 miliar lebih) atau realisasi 90,11 persen dari anggaran sebesar Rp 479.965.974.075 (Rp 479 miliar lebih). Dari belanja barang dan jasa itu, terdapat belanja perjalanan dinas di Kota Denpasar Rp 32.437.260.848 (Rp 32,4 miliar lebih). Hingga akhirnya dilakukan pemeriksaan selisih harga, secara detail termasuk dikaitkan dengan bukti fisik tiket Garuda Airlines termasuk dengan harga dasar tiket. Ditemukan ada dana yang tidak sesuai Rp 565.553.334 (Rp 565 juta lebih). Atau, kelebihan membayar sebesar Rp 565 juta lebih. (art/hen/yes)

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 31



## Radar Bali

**KEMISKINAN**



M.BASIR/BALI EXPRESS

LAMA: Warga antre PSKS hingga berjam-jam.

### Penerima PSKS Antre Berjam-jam

**NEGARA**-Pencairan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Jembrana, hingga Senin (13/4) kemarin masih terus berlangsung di kantor Kota Negara. Meski jumlah penerima lebih sedikit dari hari pertama, Sabtu (11/4) lalu, warga yang akan menerima harus antre berjam-jam untuk mendapatkan uang Rp 600 ribu, untuk periode Januari-Maret tersebut.

Seperti yang diungkapkan Ni Nyoman Suarti, penerima PSKS dari Kelurahan Pendem, Jembrana. suarti mengaku antre untuk mendapatkan dana PSKS tersebut sejak pukul 8.00 pagi dan baru mendapat dana sekitar pukul 13.00. "Antrenya lama. Saya dari pagi baru dapat," ungkapnya.

Lamanya antrean yang dialami Suatri tersebut termasuk paling cepat dibanding pencairan hari pertama pada hari Sabtu lalu, penerima PSKS gelombang pertama ada yang dari pagi antre sampai sore. Bahkan pencairan hari pertama dan kedua ditutup sampai malam. Kemarin hanya 511 keluarga dari Kelurahan Pendem dan Desa Air Kuning. "Ini masih lumayan, sebelumnya lebih ramai dan antrenya lebih lama," kata salah satu petugas Kantor Pos. Sejumlah penerima PSKS di Jembrana juga terpaksa yang pulang dengan tangan kosong karena *simcard* yang menjadi persyaratan menerima pencairan dana tidak dibawa dan ada juga yang hilang. (bas/gup)

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 29



## Sutarja Resmi Jadi Tersangka



DOK. RADAR BALI

I Wayan Sutarja

### Kerugian Rp 2,4 M

DENPASAR - Setelah cukup lama terpendam, kasus dugaan korupsi di BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali akhirnya memasuki babak baru. Sebab, Kajati Bali menetapkan IWS (I Wayan Sutarja) sebagai tersangka, kemarin (13/4) ■

► Baca *Sutarja...* Hal 31

## Sempat Alot Soal Tentukan Penggelapan atau Korupsi

### ■ SUTARJA...

*Sambungan dari hal 21*

Informasi yang dirangkum koran ini, jaksa yang menangani kasus ini melakukan gelar perkara atau ekspose. Untuk mendapatkan masukan atas kasus ini. Ternyata ada silang pendapat, terkait dengan gelar perkara ini. "Ada yang bilang ini penggelapan, murni kasus perbankan ada yang bilang ini korupsi," jelas sumber koran ini.

Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan membenarkan kondisi ini. Bahkan, dia mengatakan bahwa masih dalam berlangsung gelar perkara. "Memang masih dalam perdebatan, ada yang beberapa yakin ini bukan korupsi. Ada yang sangat yakin (korupsi). Ini memang fungsinya gelar perkara," urai Ashari di sela-sela agenda ekspose.

Akhirnya, kasus ini dinyatakan memang korupsi setelah ekspose. "Setelah kami gelar perkara kasus ini memang korupsi," ungkap-

nya. Dan, dalam gelar perkara juga dinyatakan agar kasus ini dinaikkan menjadi penyidikan dari penyelidikan. "Jadi, sekarang sudah mulai dilakukan penyidikan," ungkap Ashari.

Siapa jadi tersangka? Ashari menjawab IWS menjadi tersangka dalam kasus ini. "IWS sudah menjadi tersangka," jawabnya. Dia juga mengatakan memang dari segi kerugian Rp 1,7 miliar namun jika dihitung sampai bunga, dana itu menjadi Rp 2,4 miliar. "Namun kami belum bisa pastikan yang mana masuk kerugian, karena penentuan nilai kerugian itu ada audit," imbuhnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, muncul kabar ada penyimpangan dana di BPD Bali. Akhirnya, BPD Bali mengumumkan secara resmi penyimpangan dana ini.

Dirut BPD Bali Made Sudja menyampaikan telah terjadi deposito fiktif, sampai saat ini dua lembar. Nilainya Rp 1,7 miliar. Pelaku adalah IWS selaku pegawai marketing di BPD Tabanan. (art/yes)

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 21 & 31



**PERTANIAN**

## Swasembada, Dinas Gandeng Kodim

AMLAPURA - Target produksi padi di Karangasem, pada akhir 2015 nanti, diakui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Karangasem I Nyoman Mertha Tanaya, tergolong tinggi. Di mana, data 2015, areal rencana tanam padi seluas 13.268 hektare, dengan target produksi padi sebanyak 73.685 ton. Itu tersebar di tujuh kecamatan, minus kecamatan Kubu, yang tergolong daerah kering, tidak cocok tanaman padi.

Untuk mencapai target produksi itu, Pemkab Karangasem, menggandeng TNI dari Kodim 163/ Karangasem. Penandatanganan nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding), itu dilakukan di aula Kantor Bupati Karangasem, Senin (13/4). "Kerjasama ini, untuk target swasembada pangan," tegas Mertha Tanaya.

Berdasarkan data produksi tahun 2014, Mertha Tanaya membeberkan, produksi padi tahun 2014, mencapai 66.116,04, dengan luas panen 12.489 hektare. Dia juga memaparkan, khusus terkait produksi beras, Karangasem mampu produksi beras sekitar 37.698 ton, dalam setahun. Jika dibandingkan konsumsi beras di Karangasem, mencapai 47.165 ton per tahun, Karangasem termasuk defisit, sekitar 9.467 ton setahun. Belum lagi, beras Karangasem, juga sering dijual ke luar Karangasem. "Kalau bicara konsumsi beras saja, masih defisit. Tapi bisa ditutupi dengan konsumsi umbi-umbian, yang juga banyak ditanam masyarakat Karangasem. Seperti, ubi jalar," sebut Mertha Tanaya, ditemui usai MoU, itu.

Pihaknya optimistis, dengan luas sawah yang ada saat ini, mampu memenuhi target produksi padi, mencapai 73.685 ton. Cuma, lantaran terkendala SDM sehingga produksi padi saat ini, masih tergolong rendah. (wan/gup)

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 25



## KOPERASI

### Tetap Incar Dana LPDB

BANGLI - Adanya masalah pada salah satu koperasi penerima kucuran pinjaman lunak dari LPDB (Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir), ternyata tak membuat surut koperasi-koperasi di Bangli. Terlebih Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) memastikan jika hal tersebut tak serta merta bakal menghentikan pemberian bantuan bagi koperasi lainnya.

Namun diingatkan Diskop UKM Bangli, jika untuk memperoleh pinjaman tersebut, masing-masing koperasi harus melampirkan laporan kelayakan usaha. Tak tanggung-tanggung, laporan itu pun harus dibuat oleh akuntan publik.

Kadiskop UKM Bangli Dewa Suparta kemarin (13/4) memastikan jika bantuan dana LPDB untuk koperasi yang ada di Bangli sama sekali tidak distop. Walau pun ada salah satu koperasi penerima dana tersebut sedang dirundung masalah. "Hanya saja persyaratannya sekarang semakin diperketat. Kami juga sudah bersurat ke koperasi-koperasi, intinya sebelum meminta rekomendasi ke Diskop UKM, mereka supaya terlebih dulu membuat laporan kelayakan usaha dengan melibatkan akuntan publik," katanya.

Terkait mengenai laporan kelayakan usaha itu, dikatakan olehnya supaya kucuran dana lunak yang diberikan satuan kerja yang berada di bawah Kemenkop dan UKM itu tetap sesuai sasaran, alias tidak lagi ada penyalahgunaan. Selain itu dengan laporan itu, juga menjadi langkah meminimalisir adanya kecurangan, dimana koperasi kecil mengajukan pinjaman dengan jumlah besar. "Karena bunga yang diberikan LPDB kan relatif kecil, yakni lima persen bagi usaha riil. Lalu ada bunga sembilan persen untuk koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam," tandasnya. (wid/gup)

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 25



## Tukang Kavling Laporkan Suwirta

**SEMARAPURA** - Bupati Klungkung Nyoman Suwirta dilaporkan ke Ombudsman. Pihak yang melapor adalah Wayan Sutena, mewakili para pengembang tanah dan pemilik lahan di Klungkung atau para tukang kavling. Laporan ini merujuk kebijakan Surat Edaran (SE) Bupati No 648/270/Beppeda tertanggal 25 April 2014 tersebut telah merugikan para pengembang di Klungkung.

"Saya melapor mewakili pihak pengembang di Klungkung," kata Sutena yang mantan Ketua DPRD Klungkung tersebut kemarin. Bahkan, pihak Ombudsman telah bersurat kepada bupati soal pengaduan warga tersebut. Intinya meminta klarifikasi terkait laporan Sutena yang mengeluhkan tidak adanya sosialisasi yang ma-

sif sebelum dan sesudah SE tersebut diterbitkan. Akibat kebijakan itu dinilai telah merugikan para pengembang kecil dan warga pemilik lahan yang kesulitan menjual lahannya.

Sementara itu Ombudsman juga minta klarifikasi terkait dasar hukum pendukung dan pertimbangan penerbitan surat edaran tersebut. Terlebih lagi keinginan tersebut belum merupakan keputusan atau ketetapan. "Selain itu saya juga melaporkan soal kisruh mutasi guru di Klungkung dan monopoli pengadaan ATK," papar Sutena. Menanggapi laporan tersebut Suwirta tampak santai saja. Bupati mengakui keluarnya SE tersebut pada prinsipnya adalah untuk melindungi tanah pertanian di Klungkung agar tidak tergerus alih fungsi lahan. (tra/gup)

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 25